

Keterbukaan Informasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("Perseroan")

Latar Belakang

1. Pada tanggal 24 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**Perubahan Ketiga UU BUMN**").
2. Perubahan Ketiga UU BUMN mencakup perubahan-perubahan penting terkait pengelolaan BUMN, termasuk antara lain (i) perubahan definisi BUMN dan (ii) pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("**Danantara**").
3. Dengan ini Perseroan menyampaikan informasi-informasi berikut sebagai bentuk kepatuhan janji-janji informasi kepada kreditur dalam perjanjian pembiayaan terkait.

Perubahan Definisi BUMN

4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ("**UU BUMN**") mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
5. Dengan diundangkannya Perubahan Ketiga UU BUMN, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan modal langsung; atau

Information Disclosure of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("Company")

Background

1. On 24 February 2025, the President of the Republic of Indonesia enacted Law Number 1 of 2025 on the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises ("**Third Amendment to the SOEs Law**").
2. The Third Amendment to the SOEs Law includes essential changes related to the management of SOEs, including among others (i) changes to the definition of SOEs and (ii) the establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency ("**Danantara**").
3. The Company hereby provides the following information as a form of compliance with the information covenants to the lenders in the relevant financing agreement.

Changes in the Definition of SOEs

4. Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, as amended by Law Number 6 of 2023 on Job Creation ("**SOEs Law**"), defines SOEs as business entities whose capital is wholly or partially owned by the State of the Republic of Indonesia through direct participation from state-separated assets.
5. With the enactment of the Third Amendment to the SOEs Law, SOEs are defined as business entities that fulfil at least one of the following conditions:
 - a. all or most of its capital is owned by the Republic of Indonesia through direct participation; or

- | | |
|--|--|
| <p>b. terdapat hak istimewa negara yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.</p> | <p>b. there are state special rights owned by the Republic of Indonesia.</p> |
| <p>6. Pelaksanaan hak istimewa diatur lebih lanjut dalam Pasal 4C Perubahan Ketiga UU BUMN yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa pada Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.</p> | <p>6. The implementation of special rights is further regulated in Article 4C of the Third Amendment to the SOEs Law which states that the Republic of Indonesia owns series A Dwiwarna shares with special rights in Investment Holding, Operational Holding, and SOEs.</p> |

Pembentukan Danantara

7. Bab I(C) Perubahan Ketiga UU BUMN mengatur pendirian Danantara sebagai badan yang melaksanakan tugas Pemerintah Indonesia di bidang pengelolaan BUMN. Lebih lanjut, Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
8. Untuk melaksanakan tugasnya, Danantara memiliki berbagai kewenangan termasuk: (i) mengelola dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN, (ii) menyetujui penambahan modal dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen, dan (iii) memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan presiden.
9. Danantara diberikan kekuasaan selaku pemegang saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional berdasarkan Pasal 3A3 Perubahan Ketiga UU BUMN.

Keterbukaan Informasi

10. Sebagai tindak lanjut implementasi Perubahan Ketiga UU BUMN, Perseroan telah menerima Surat Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. S-134/MBU/03/2025 tertanggal 18 Maret 2025 ("**Surat RUPS**") perihal perubahan jenis saham dan perubahan anggaran dasar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

The Establishment of Danantara

7. Chapter I(C) of the Third Amendment to the SOEs Law stipulates the establishment of Danantara as an entity that carries out the duties of the Government of Indonesia in the management of SOEs. Furthermore, Danantara is an Indonesian legal entity that is wholly owned by the Government of Indonesia.
8. To carry out its duties, Danantara has various authorities including: (i) managing the dividends of Investment Holding, Operational Holding, and SOEs, (ii) approving capital increases and/or reductions of capital participation in SOEs sourced from dividend management, and (iii) granting loans, receiving loans, and collateralizing assets with presidential approval.
9. Danantara is granted power as a holder of series B shares in the Investment Holding and Operational Holding based on Article 3A3 of the Third Amendment to the SOEs Law.

Information Disclosure

10. As a further implementation of the Third Amendment to the SOEs Law, the Company has received Letter of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders No. S-134/MBU/03/2025 dated 18 March 2025 ("**GMS Letter**") regarding changes in the type of shares and amendments to the articles of association PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

11. Berdasarkan Surat RUPS, Perseroan dapat menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. RUPS Perseroan menetapkan, antara lain, perubahan jenis saham Perseroan yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham seri B, sehingga modal dasar Perseroan sebesar Rp439.000.000.000.000 yang terbagi atas:

i. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan

ii. 438.999.999 (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp438.999.999.000.000.

b. RUPS Perseroan menetapkan perubahan anggaran dasar perseroan yang berkaitan dengan modal dan saham Perseroan, yang antara lain mengatur bahwa saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

i. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia; dan

ii. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

11. Based on the GMS Letter, the Company can state the following matters:

a. The Company's GMS stipulated, among others, changes in the types of shares of the Company which were originally without series to consist of Series A Dwiwarna shares and series B shares, so that the authorized capital of the Company amounted to Rp439,000,000,000,000 divided into:

i. 1 (one) series A Dwiwarna share with a nominal value of Rp1,000,000.00 (one million rupiah); and

ii. 438,999,999 (four hundred thirty-eight million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine) series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) or a total nominal value of Rp438,999,999,000.

b. The Company's GMS stipulates the amendment of the Company's articles of association relating to the Company's capital and shares, which among others regulates that the Company's shares are shares in name and issued in the name of the owner registered in the Shareholders Register consisting of:

i. Series A Dwiwarna Shares which can only be owned by the Republic of Indonesia; and

ii. Series B Shares which may be owned by the Republic of Indonesia and/or the public.

- | | |
|---|---|
| <p>12. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional (“PP 15/2025”).</p> | <p>12. Furthermore, the Government of Indonesia enacted Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 15 of 2025 dated 21 March 2025 on the Addition of State Capital of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia for the Establishment of the Operational Holding (“GR 15/2025”).</p> |
| <p>13. Menindaklanjuti PP 15/2025, Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan melalui Surat Nomor: S-190/MBU/03/2025 tanggal 22 Maret 2025 perihal Persetujuan Pengalihan Saham PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang antara lain menyampaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyetujui pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk dijadikan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebanyak 150.536.095 (seratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh lima) lembar saham senilai Rp150.536.095.000.000,00 (seratus lima puluh triliun lima ratus tiga puluh enam miliar sembilan puluh lima juta rupiah), dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai PP 15/2025. b. Dengan pengalihan saham di atas, maka Pemegang Saham Perseroan adalah Negara Republik Indonesia dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). | <p>13. Following GR 15/2025, the Minister of SOEs as the Company's GMS through Letter Number: S-190/MBU/03/2025 dated 22 March 2025 regarding Approval of the Transfer of Shares of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), which among others stated:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Approved the transfer of all series B shares owned by the Republic of Indonesia in the Company to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) to be used as additional capital participation of the Republic of Indonesia in PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) amounting to 150,536,095 (one hundred fifty million five hundred thirty-six thousand ninety-five) shares worth of Rp150,536,095,000,000.00 (one hundred fifty trillion five hundred thirty-six billion ninety-five million rupiah), with each share having a nominal value of Rp1,000,000.00 (one million rupiah) in accordance with GR 15/2025. b. With the transfer of shares above, the Shareholders of the Company are the Republic of Indonesia and PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). |
| <p>14. Pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Akta Penyertaan Saham Dengan Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas No. 121 tanggal 22 Maret 2025</p> | <p>14. The transfer of series B shares owned by the Republic of Indonesia in the Company to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) has been executed based on the Deed of Capital Participation by Inclusion in the Limited Liability Company (<i>Akta Penyertaan Saham Dengan Pemasukan</i></p> |

dibuat di hadapan Josedima Satria SH, Mkn, Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), yang antara lain menyetujui pengalihan Saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk dijadikan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebanyak 150.536.095 (seratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh lima) lembar saham senilai Rp150.536.095.000.000,00 (seratus lima puluh triliun lima ratus tiga puluh enam miliar sembilan puluh lima juta rupiah), dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai PP 15/2025.

Dalam Perseroan Terbatas) No. 121 dated 22 March 2025 made before Josedima Satria SH, Mkn, Notary in Jakarta, signed by the Republic of Indonesia and PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) which among others approved the transfer of series B shares owned by the Republic of Indonesia in the Company to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) to serve as additional capital participation of the Republic of Indonesia in PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) amounting to 150,536,095 (one hundred fifty million five hundred thirty-six thousand ninety-five) shares worth of Rp150,536,095,000,000.00 (one hundred fifty trillion five hundred thirty-six billion ninety-five million rupiah), with each share having a nominal value of Rp1,000,000.00 (one million rupiah) in accordance with GR 15/2025.

15. Sampai dengan tanggal diterbitkannya keterbukaan informasi ini, Perseroan masih tetap berstatus BUMN, dimiliki 100% oleh Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya tidak ada perubahan pengendalian di Perseroan.
16. Dalam proses peralihan kepemilikan saham sebagaimana diamanahkan dalam UU BUMN dan arahan RUPS Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk :
 - a. memastikan kelangsungan usaha dan operasional Perseroan; dan
 - b. memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan-ketentuan yang mengikat Perseroan berdasarkan kontrak-kontrak dengan para kreditur, pemegang obligasi dan pihak ketiga lainnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. As of the date of issuance of this information disclosure, the status of the Company remains SOE, 100% owned by the Republic of Indonesia and therefore there is no change of control in the Company.
16. In the process of transferring share ownership as mandated in the SOEs Law and the direction of the Company GMS, the Company is committed to :
 - a. ensure the continuity of the Company's business and operations; and
 - b. ensure compliance with all provisions binding on the Company under contracts with creditors, bondholders and other third parties as well as applicable laws and regulations.

Surat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal adanya ketidaksesuaian, versi Bahasa Indonesia berlaku.

This letter is made in Bahasa Indonesia and English versions. In the event of discrepancy, the Bahasa Indonesia version prevails.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat diketahui. Atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hereby, this information is delivered for your attention. We thank you for your attention and trust.

Jakarta 27 Maret 2025 / *Jakarta, 27 March 2025,*
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary



Alois Wisnuhardana